



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Rembang



**RENSTRA PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



dihkabrembang



Dlh Kabupaten Rembang



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Telp. 0295-6998122

<http://dinaslh.rembangkab.go.id>



Jl. Pemuda Km.2 Rembang



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk 5 (Lima) Tahun ke depan dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang dibuat sebagai landasan serta pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Mengingat pentingnya manfaat dokumen Renstra ini, maka diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar dokumen Renstra 2021-2026 betul-betul sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Rembang, Juli 2022

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang**



**Ir. DWI PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009



# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR .....	7
Halaman .....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN .....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Landasan Hukum.....	9
C. Maksud dan Tujuan .....	13
D. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	15
KABUPATEN REMBANG .....	15
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	15
B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	21
C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	25
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.....	60
BAB III .....	62
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	62
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	62
B. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	64

C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah .....	66
BAB IV .....	73
TUJUAN DAN SASARAN.....	73
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang.....	73
BAB V .....	82
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	82
A. Strategi.....	82
B. Arah Kebijakan.....	82
BAB VI.....	84
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	84
A. Rencana Program dan Kegiatan .....	84
BAB VII.....	109
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	109
BAB VIII .....	111
P E N U T U P.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	112

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Golongan Periode Juni Tahun 2021 .....	21
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional .....	22
Tabel 2. 4 Jumlah THL dan Kontrak DLH Per Juni Tahun 2021 .....	22
Tabel 2. 5 Jumlah Sarana Dan Prasarana Sampai Dengan Desember 2020 .....	23
Tabel 2. 6 Realisasi Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup .....	26
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja (IKU) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang RPJMD Tahun 2016 - 2021 .....	27
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	28
Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2020.....	32
Tabel 2. 10 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2016-2018 .....	38
Tabel 2. 11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2019.....	43
Tabel 2. 12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2020.....	48
Tabel 2. 13 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2017.....	55
Tabel 2. 14 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2018.....	56
Tabel 2. 15 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2019.....	57
Tabel 2. 16 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2020.....	58
Tabel 2. 17 Jumlah Sampah Terangkut Ke TPA Per Kecamatan Tahun 2017-2020 .....	59
Tabel 2. 18 Jumlah Perkembangan Bank Sampah Aktif Tahun 2017-2020.....	59
Tabel 2. 19 Perusahaan Yang Memiliki Ijin Penyimpanan Limbah B3 Di Kabupaten Rembang	60
Tabel 2. 20 Rekomendasi Ijin Dan SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.....	60
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	63

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	65
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Kementrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	68
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan sasaran Renstra Kementrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	69
Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	71
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Program Jangka Menengah.....	73
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	83
Tabel 6. 1 Rencana Program Kegiatan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	84
Tabel 6. 2 Pendanaan Indikatif Tahun 2022 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang .....	86
Tabel 6. 3 Visi Misi Tujuan, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran dan Indikator sasaran Daerah .	102
Tabel 6. 4 Tujuan, Indikator Tujuan OPD, Sasaran, Indikator Sasaran OPD.....	103
Tabel 6. 5 Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab Rembang Tahun 2022 - 2026.....	104
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DLH Kabupaten Rembang Berdasarkan Perbup Rembang No. 68 Tahun 2021 .....	20
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026, yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokoknya melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran huruf K yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (1) dinyatakan bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, sedangkan pada ayat (2) rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra perangkat daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di perangkat daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017



tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026 digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lain antara lain dokumen RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Rembang, sehingga dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang komperhensif 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra (Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698),
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 29) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 30) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- 38) Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
- 39) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura;
- 40) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
- 41) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 42) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 43) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- 46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



## **C. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang ini adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan juga sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung visi dan misi Bupati Rembang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 3) Memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **D. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan.

### **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan sesuai Renstra periode

sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

### **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat atau pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang dalam lima tahun mendatang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII Penutup**

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **KABUPATEN REMBANG**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

##### **a. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam rangka menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, dimana dari peraturan tersebut diatas terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **b. Uraian Tugas**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 68 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup dan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Rembang nomor 68 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

a) Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup.
- Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan Dinas
- Melaksanakan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.



b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Mengkoordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- Mengkoordinasi dan menyusun rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengkoordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. **Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan**

1) Tugas Pokok

Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan yang terdiri dari perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan ;
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan ; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan**

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan yang terdiri dari pengelolaan sampah, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan.

b) Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;
- Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan sampah, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

a) Tugas Pokok

Perumusan Konsep dan Pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

b) Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

**f. Kepala Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Sampah**

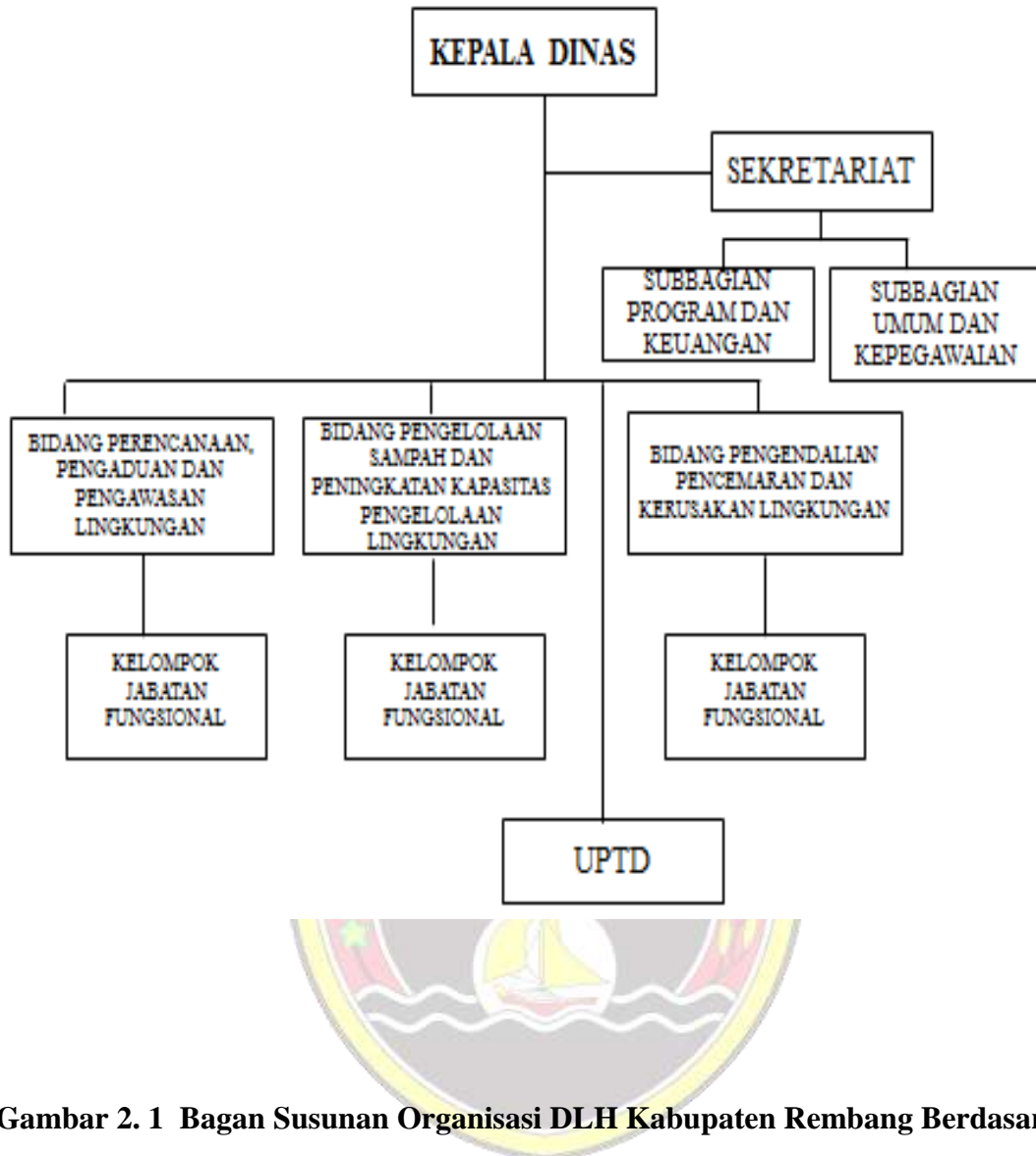
a) Tugas Pokok

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

b) Fungsi

- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPT;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
- Pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA;
- Pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPA;
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**



**Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DLH Kabupaten Rembang Berdasarkan Perbup No. 68 Tahun 2021**



## B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

### a) Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sampai saat ini Sumber Daya Manusianya sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan kondisi sebagai berikut :

#### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan dalam Tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Periode Juni Tahun 2022**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	D4/S1	S2	
1	Kepala	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	1	-	2	1	6	1	11
3	Bidang Perencanaan Pengaduan dan pengawasan Lingkungan	-	-	-	-	3	-	3
4	Bidang Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	-	-	2	-	6	-	8
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4	14	1	-	6	1	26
6	UPTD	14	26	31	-	3	-	74
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>123</b>

#### b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan tertera dalam Tabel berikut :

**Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Golongan Periode Juni Tahun 2022**

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	1	2	5	1	9
3	Bidang Perencanaan Pengaduan dan pengawasan Lingkungan	-	-	3	1	4
4	Bidang Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	-	1	5	-	6
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4	32	8	1	45
6	UPTD	20	35	3	-	58
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>123</b>

**c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional**

Jumlah pegawai menurut jabatan struktural tertera dalam Tabel berikut :

**Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai DLH Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional  
Periode Juni Tahun 2022**

No	Uraian	Eselon			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala	-	-	1	1
2	Sekretariat	2	1	-	3
3	Bidang Perencanaan Pengaduan dan pengawasan Lingkungan	2	1	-	3
4	Bidang Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	3	1	-	4
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3	1	-	4
6	UPTD	2	-	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

**d. Jumlah THL dan Kontrak**

Jumlah tenaga harian lepas dan kontrak tertera dalam Tabel berikut :

**Tabel 2. 4 Jumlah THL dan Kontrak DLH Per Juni Tahun 2022**

No	Uraian	Kontrak	THL	Jumlah
1	Sekretariat	2	7	9
2	Bidang Perencanaan Pengaduan dan pengawasan Lingkungan	1	1	2
3	Bidang Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	-	2	2
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3	13	16
5	UPTD	13	44	57
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>86</b>

**b) Sarana dan Prasarana (Asset)**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 5 Jumlah Sarana Dan Prasarana Sampai Dengan Desember 2021  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

NAMA BARANG		JUMLAH
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	1,511
a	<b>Tanah</b>	12
b	<b>Alat-alat Besar</b>	13
	- Buldozer	1
	- Excavator Lain-lain	1
	- Dump Truck	2
	- Truck Crane	3
	- Portable Generating Set	2
	- Portable Water Pump	4
c	<b>Alat-alat Angkutan</b>	362
	- Station Wagon	5
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1
	- Truck + Attachment	10
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	35
	- Sepeda Motor	30
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	7
	- Gerobak Dorong	182
	- Angkutan Barang Lain-lain/Kontainer	34
	- Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain	65
d	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	107
	- Mesin Bor Tangan	100
	- Mesin Gergaji	2
	- Global Positioning System	2
	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1
	- Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg	2
e	<b>Alat Pertanian</b>	46
	- Traktor Tangan dengn Perlengkapannya	1
	- Alat Processing Lain-lain	44
	- Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1
f	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	930
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
	- Mesin Calculator	1
	- Lemari Besi	3
	- Rak Kayu	15
	- Filling Besi/Metal	7
	- Filling Kayu	9

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NAMA BARANG		JUMLAH
	- Lemari Kaca	3
	- Lemari kayu	6
	- Perkakas Kantor	1
	- Papan Pengumuman	43
	- White Board	2
	- Lemari Kayu	14
	- Rak Kayu	1
	- Meja Kayu/Rotan	22
	- Kursi Besi/Metal	3
	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	23
	- Meja Rapat	33
	- Meja Tulis	15
	- Kursi Rapat	39
	- Kursi Tamu	1
	- Kursi Putar	5
	- Kursi Lipat	24
	- Meja Komputer	10
	- Sofa	2
	- Mesin Potong Rumput	7
	- Lemari Es	1
	- AC Unit	11
	- AC Split	17
	- Kipas Angin	4
	- Televisi	8
	- Loudspeaker	1
	- Sound System	3
	- Wireless	1
	- Tangga Alumunium	2
	- Dispenser	3
	- Handy Cam	5
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	409
	- P.C Unit	12
	- Lap Top	40
	- Note Book	13
	- Palm Top	2
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
	- Printer	17
	- Monitor	2



NAMA BARANG			JUMLAH
	-	Printer	14
	-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3
	-	Server	1
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5
	-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
	-	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5
	-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
	-	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	32
	-	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5
	-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1
	-	Pompa Air	2
	-	Selang spiral	1
	-	Peralatan Las	1
g		<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	37
	-	Camera + Attachment	1
	-	Proyektor + Attachment	7
	-	Compact Disc. Player	1
	-	Peralatan studio Visual Lain-lain	4
	-	Camera Electronic	17
	-	Layar Film	1
	-	Compas Geologi	1
	-	Sound System	2
	-	Facsimile	2
	-	Antena SHF/Parabola Stationary	1
H		<b>Alat Laboratorium</b>	16
	-	Alat Pemadam Kebakaran	2
	-	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1
	-	Generator Set (Lab Scale)	1
	-	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	12

### C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Pembangunan lingkungan hidup menghendaki pemerintahan yang baik dengan indikator bersih dari korupsi, efektif dalam bekerja, transparan dan partisipatif dalam menentukan kebijakan dan program, serta konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Keberhasilan program dan kegiatan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup terutama

tenaga Teknis, contoh sampai saat ini yang bertugas sebagai petugas laboratorium dan analisis masih terbatas sehingga fungsi laboratorium belum berjalan secara optimal, di samping keterbatasan personil dan keterbatasan sarana dan prasarana, juga kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dirasa masih sangat rendah. Kewajiban menyusun dokumen kajian lingkungan hanya didasarkan pada adanya persyaratan perijinan.

Terkait dengan pelayanan fasilitasi pengajuan Izin lingkungan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha dan penanganan pengaduan kurang, pelayanan dilakukan melalui rekomendasi izin PPLH yang terkait sebagai contoh usaha dan/atau kegiatan yang sudah operasional diberikan pelayanan berupa penerbitan rekomendasi Izin atau Izin kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ( Limbah B3 ).

Pelayanan yang lain berupa fasilitas percontohan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil, pembangunan sarana dan prasarana di taman mangrove, penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan dalam bentuk Dokumen IKPLHD serta menerima pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup termasuk organisasi perangkat Daerah yang memiliki potensi pendapatan melalui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai PERDA No 12 tahun 2011. Adapun pendapatan retribusi yang dihasilkan empat tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 6 Realisasi Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang**

No	Tahun	Target/Rp	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2017	130,000,000	130,000,000	100%
2	2018	130,000,000	130,000,000	100%
3	2019	130.000.000	130.000.000	100%
4	2020	120.420.000	120.420.000	100%
5	2021	150.000.000	150.762.500	100,51%

**Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja (IKU) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang  
RPJMD Tahun 2016 - 2021**

No	Aspek/Bidang /Urusan /Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target						Realisasi						Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>															
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5	5	5	5	5	-	-	6	5.35	-	4.2	-	-	
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	63.3	63,30	66	66,5	67	58.9	44,99	63,30	63,3	46,61	64.44	68.10	<b>54,00</b>	111.17
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	-	-	-	-	51	56.03	60,00	-	-	-	43.85	50.00	<b>48,75</b>	83.44
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	-	-	-	-	55	88.18	90.05	-	-	-	93.05	89.68	<b>89,16</b>	99.59
	Luas Tutupan Lahan	Ha	-	-	-	-	61	36,728.337	36,800	-	-	-	58.42	41,459	<b>41,459</b>	112.66

**Sumber Data : Perda Perubahan RPJMD Kab.Rembang Tahun 2016 - 2021**

**Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

NO	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program							
					Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019	
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>											
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
		Persentase sampah terangkut	%	20	23,98	56	28,53	61	33,96	34,79	40,41	14
		Prosentase pengangkutan sampah	%	70	75	78	80	83	90	15,02	100	51
		Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	4	5	7,61	6	9,8	8	1,6	10	1,6
		Persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	n.a	30	32	40	41	50	10	60	10
		Persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	n.a	10	14	20	24	30	100	50	40
		Persentase bank sampah aktif	%	10	20	19	30	33	40	82,5	50	48
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup											
		Persentase penanganan kasus pencemaran / kerusakan LH	%	100	100	100	100	100	100	95	100	95
		Indeks kualitas air	skor		73% Kelas A	60	80% Kelas A	65	90% Kelas A	40	100	43,85
		Indeks kualitas udara	skor	n.a	diatas baku mutu	50	diatas baku mutu	56	diatas baku mutu	49,51	Diatas baku mutu	93,05

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program							
					Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019	
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	n.a	60,15	63,5	62,15	66	64,15	46,61	66,15	64,44
		Presentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	n.a	10	2	15	2	30	2	40	20
		Presentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	n.a	20	0	25	0	35	70	45	-
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam											
		luasan kawasan konservasi	Ha	145	147	0	150	0	152	42	154	-
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	70	60	40	50	20	40	24	30	30
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	37	35	20	33	20	30	24	28	12
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	70	80	80	80	80	80	80	80	-
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	n.a	DDL≤1	0	DDL≤1	0	DDL≤1	0	DDL≤1	-
		presentase tutupan vegetasi	%	75	75	65	75	65	75	69	75	50
4	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam											
		Presentase rehabilitasi SDA	%	30	38	20	45	25		29	52	30
		Persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	n.a	100	0	100	0		-	100	70



NO	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program							
					Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019	
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup											
		persentase validasi data dan informasi SLHD pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	70	75	100	80	100	83	85	75	75
		persentase aduan masyarakat yang di tindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	95	100	100
6	Program peningkatan pengendalian polusi											
		indeks kualitas LH	indeks	67	67	63,5	67,5	66	68	46,61	67,00	64,44
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut											
		cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	4	4	6	6	7	9	8	6
		persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	22	30	30	40	40	50	49	60	70
		pesentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%	n.a	10	10	20	30	30	30	40	40
8	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)											
		rasio luasan RTH	rasio	0	0,15	0	0,17	60	0,20	30	0,23	0,2
		persentase luas RTH perkotaan publik	%	12	13,35	0	14,76	40	16,34	85	17,89	12

NO	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program							
					Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019	
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
9		Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan										
		lokasi pengembangan ekowisata	lokasi	3	3	3	4	6	5	-	6	6
		persentase ODTW berbasis ekowisata dan jasa lingkungan	%	n.a	10	10	20	30	30	-	40	40
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%	n.a	10	10	20	30	30	-	40	40
10		Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup										
		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	10	15	0	20	0	23	25	25	40
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%	100	100	0	100	0	100	75	100	100

**Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2020**

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program	
					Realisasi 2020	
					Target	Capaian
	Urusan Lingkungan Hidup					
1	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	- Prosentase ketercapaian pelayanan umum, sarana prasarana, pemenuhan pelayanan kepegawaian, pemenuhan keuangan	%	90	90	100
	- Peningkatan Manajemen adm. Pelayanan umum	Prosentase pemenuhan pelayanan adm perkantoran	%	100	100	100
	- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100
	- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100
	- Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Prosentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100
2	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase ketercapaian perencanaan dan Evaluasi kinerja SAKIP Formula : (Jml capaian indicator kinerja/jml target indicator kinerja)x100%	%	65	65	100
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jml Indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	dok	5	5	100
	- Penyusunan dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jml capaian indicator kinerja	dok	10	10	100
3	<b>Program peningkatan keterbukaan informasi public</b>	Presentase informasi yang disampaikan ke public, Formula : (Jml Informasi yang disampaikan public/jml informasi yg wajib disampaikan) x100%	%	90	83,33	92,59
	- Pengelolaan keterbukaan informasi public	Prosentase informasi pelayanan publik	%	100	100	100
4	<b>Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>	- Prosentase sampel yang memenuhi baku mutu (formula=Jml sampel yg memenuhi baku mutu/jml sampel yg diambil)x100%	%	55	57	104,45

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program	
					Realisasi 2020	
					Target	Capaian
		- Prosentase lahan kritis yang ditangani $= (\text{Jml pengendalian kerusakan dan dampak perubahan iklim} / \text{jml lokasi kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim}) \times 100\%$	%	90	81,49	90,54
	- Pengendalian pencemaran lingkungan	Jml titik pengambilan sampel	Titik sampel	44	47	106,82
	- Pengendalian kerusakan lingkungan	Jml pengendalian kerusakan lingkungan	lok	6	7	116,67
	- Pengendalian dampak perubahan iklim	Jml pengendalian dampak perubahan iklim	lok	6	6	100
5	<b>Program Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas</b>	<b>Prosentase pengelolaan sampah (berat sampah yang tertangani/berat timbulan sampah) x 100</b>	%	<b>20</b>	<b>82,86</b>	<b>414,32</b>
	- Pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Berat sampah yang terpilah	ton	24	58.579,85	244.083
	- Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Jml usaha yang memiliki TPS Limbah B3	perusahaan	18	18	100
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jml Masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	KM	30	36	120
	- Operasional pengumpulan, pengangkutan serta pengelolaan sampah di TPA	Berat sampah yang terangkut	ton	12.880	12.391,88	96,21
6	<b>Program penataan dan Pnaatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Prosentase perusahaan yang memiliki dokumen ijin lingkungan</b>	Prshaan	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>75</b>
	- Perencanaan dan kajian dampak lingkungan	Form= $(\text{Jml perusahaan yg mempunyai dok ijin lingk} / \text{Jml pershaan yg wajib memiliki ijin lingk}) \times 100\%$ Terbitnya ijin lingkungan baru	Ijin	40	45	113
	- Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jml pengaduan masyarakat yang tertangani	aduan	5	5	100
	- Pnaatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	Jml Perusahaan yang taat ijin Lingkungan	perusahaan	25	87	348

**Tabel 2.10. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, sarana prasarana, pemenuhan pelayanan kepegawaian, pemenuhan keuangan	%	95	90	94,31	<b>10.397.631.000</b>	<b>9.770.377.078</b>	93,97
		- Perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Presentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	%	70	90	84,02	89.500.000	61.350.100	68,55
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan keuangan	%	95	95	100	8.287.610.000,-	7.873.849,539	95,01
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	%	95	100	105,26	182.000,-	182.000,-	100
		- Administrasi Umum Perangkat daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum	%	95	74	82,31	226.676.804,-	168.501.111,-	74,34
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa penunjang	%	95	93	93,49	1.711.843.196,-	1.597.939.926,-	93,39
		- Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	%	95	85	85,79	82.619.000,-	68.554.402,-	82,98
2.	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase perusahaan yang memiliki ijin lingkungan (Jml Perusahaan yang mempunyai dokumen ijin lingkungan/Jml perusahaan yang wajib memiliki ijin lingkungan ) x 100%	%	70	<b>73</b>	<b>104,28</b>	125.356.700,-	109.703.000,-	87,51

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten/Kota	Ijin	40	58	145	125.356.700,-	109.703.000,-	87,31
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% sampel yang memenuhi baku mutu (jumlah sampel yang memenuhi mutu/jml sampel yg diambil x 100%)	%	60	77,5	129,16	328.212.800,-	316.728.860,-	96,50
		- Pencegahan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota	- Jumlah titik pengambilan sampel - Jumlah pembentukan desa Proklamasi	Titik lokasi	44 8	45 2	102,27 25	81.694.840,-	74.296.100,-	90,94
		- Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota	- Jumlah lokasi kerusakan yang tertangani	lokasi	2	2	100	246.517.960,-	242.432.760,-	98,24
		Program Pengelolaan persampahan	- % Penanganan Sampah	%	25	14,83	59,32	2.946.318.000,-	2.804.248.044,-	95,18
		- Pengelolaan persampahan	- Berat sampah yang terangkut	ton	13.920	13.291,205	95,48	2.946.318.000,-	2.804.248.044,-	95,18
		Program pengendalian Bahan B3 dan Limbah B3	- Presentase perusahaan yang memiliki TPS Limbah B3	%	25	25	100	25.000.000,-	23.177.500,-	92,71
		- Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki TPS Limbah B3	usaha	23	23	100	25.000.000,-	23.177.500,-	92,71
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional	Presentase penanganan sampah (Berat sampah tertangani / berat timbulan sampah) x 100%	%	25	14,83	59,32	187.000.000,-	186.234.050	99,59
		- Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di	- Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	unit	5	5	100			

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		daerah Kab/Kota								
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	%	100	90	90	39.200.000,-	21.250.000,-	54,21
		- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	aduan	6	5	83,33			
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Prosentase penghargaan Lingkungan Hidup untuk Sekolah	%	100	93	93,00	110.000.000,-	107.620.000,-	97,84
		- Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah ADIWIYATA tingkat kabupaten	sekolah	20	12	60	110.000.000,-	107.620.000,-	97,84
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase perusahaan yang memiliki dokumen ijin lingkungan	%	70	210	300	59.758.300	26.180.000,-	43,81
		- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH nya diterbitkan oleh Pemda Kab/kota	Jumlah perusahaan yang taat ijin lingkungan hidup	perusahaan	30	90	300	59.758.300	26.180.000,-	43,81
		Program Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	25	100	400	75.000.000,-	70.130.000,-	93,51
		- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (org)	org	100	101	101	75.000.000,-	70.130.000,-	

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

No	Sasaran Strategis	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Prosentase lahan kritis yang ditangani =(Jml pengendalian kerusakan dan dampak perubahan iklim/jml lokasi kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim)x100%	%	0,01591	0,01538	96,66	286.787.200,-	278.021.702,-	96,94
		- Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kab/Kota	- Jumlah Pengendalian Kerusakan - Pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	lokasi	6	13	216			
				lokasi	2	2	100			

**Tabel 2. 11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2016-2018**

NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>618.430.000</b>	<b>583.529.700</b>	<b>94</b>	100%	<b>550.400.000</b>	<b>546.037.654</b>		100%	<b>1.454.402.000</b>	<b>1.426.874.272</b>	98,11%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	37.107.000	82,46	100%	62.000.000	59.172.196	95,44%	100%	75.000.000	67.995.980	90,66%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	227.200.000	225.700.000	99,34	100%	222.500.000	222.500.000	100,00%	100%	270.650.000	269.399.625	99,54%	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.820.000	38.820.000	100	100%	49.500.000	49.500.000	100,00%	100%	56.000.000	54.504.500	97,33%	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.141.000	18.530.000	96,81	100%	10.000.000	10.000.000	100,00%	100%	23.500.000	23.500.000	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.889.000	21.318.100	97,39	100%	16.700.000	16.700.000	100,00%	100%	18.000.000	17.950.000	99,72%	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	7.389.000	86,93	100%	15.000.000	14.850.000	99,00%	100%	2.000.000	1.978.000	98,90%	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	10.000.000	8.950.000	89,50	100%	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%	13.000.000	13.000.000	100%	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	23.416.000	97,57	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	9.000.000	9.000.000	100%	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	123.000.000	117.911.600	95,86	100%	22.700.000	22.700.000	100,00%	100%	45.000.000	33.928.000	75,40%	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	16.380.000	16.380.000	100	100%	115.000.000	113.840.458	98,99%	100%	134.000.000	130.966.217	97,74%	100%
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	39.500.000	30.901.000	78,23	100%	0	0	0	0	783.252.000	779.651.950	99,54%	100%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45.000.000	37.107.000	82,46	100%	21.500.000	21.275.000	98,95%	100%	25.000.000	25.000.000	100%	100%
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>469.270.000</b>	<b>460.615.250</b>	<b>98,15</b>	<b>100%</b>	<b>182.800.000</b>	<b>175.333.000</b>	<b>97,22%</b>	<b>100%</b>	<b>156.250.000</b>	<b>152.576.500</b>	<b>97,65%</b>	<b>83,33%</b>
13	Pengadaan Lap top	19.000.000	19.000.000	100%	100%								
14	Pengadaan Kend. Dinas Operasional	257.940.000	250.240.000	97,01	100%								
13	Pengadaan alat kantor dan Rumah Tangga/Peralatan Kantor	25.000.000	25.000.000	100	100%	13.500.000	13.125.000	99,31%	100%	42.800.000	40.200.000	93,93%	100%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77.600.000	77.400.000	99,74	100%	29.000.000	28.800.000	99,31%	100%	36.000.000	35.700.000	99,17%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.230.000	68.478.625	98,91	100%	54.000.000	51.503.250	100,00%	100%	59.450.000	58.745.500	98,81%	100%
16	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Kantor	7.000.000	7.000.000	100	100%	7.000.000	6.999.750	100,00%	100%	9.000.000	8.982.000	99,80%	100%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air	7.000.000	7.000.000	100	100%	7.000.000	7.000.000	100,00%	100%	9.000.000	8.949.000	99,43%	100%
18	Pemeliharaan rutin/berkala taman	6.500.000	6.500.000	100	100%	12.300.000	12.300.000	100,00%	100%	-	-	-	-
19	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	32.400.000	32.400.000	100	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>196.750.000</b>	<b>180.475.000</b>	<b>92 %</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>92,68%</b>	<b>100%</b>	<b>199.206.700</b>	<b>199.206.700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	99,00%	100%
19	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	166.750.000	162.475.000	97,44%	100%	50.000.000	49.500.000	99,00%	100%	-	-	-	-
19	Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	30.000.000	18.000.000	50,99	100%	-	-	-	-	187.706.700	187.706.700	100%	100%
20	Fasilitas Jasa Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	100%	100%
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>32.700.000</b>	<b>31.899.999</b>	<b>97,5</b>	<b>100%</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>76.124.000</b>	<b>76.124.000</b>	<b>98,9 %</b>	<b>100%</b>
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	5.000.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.000.000	6.000.000	100,00%	100%
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	6.000.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.400.000	6.400.000	100,00%	100%
23	Penyusunan Renstra, Renja	16.700.000	16.700.000	100%	100%	13.165.000	13.165.000	100,00%	100%	23.400.000	22.400.000	95,73%	100%
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	4.199.999	83,98	100%	-	-	-	-	17.000.000	17.000.000	100,00%	100%
24	Penyusunan Dokumen Anggaran	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.824.000	6.824.000	100,00%	100%
26	Penyusunan LKjIP, LKPJ, LPPD, LAKIP	-	-	-	-	6.835.000	6.835.000	100,00%	100%	6.000.000	6.000.000	100,00%	100%
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Anggaran	-	-	-	-	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>494.060.000</b>	<b>488.796.000</b>	<b>98,93</b>	<b>100%</b>	<b>3.432.500.000</b>	<b>3.354.682.310</b>	99,85%	100%	<b>8.294.955.058</b>	<b>8.123.976.518</b>	97,94%	100%
28	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	474.060.000	468.796.000	98,89	100%	0	0	95,27%	100%	<b>1.558.350.000</b>	<b>1.518.453.000</b>	97,44%	100%
29	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	20.000.000	20.000.000	100	100%	20.000.000	16.450.000	82,25%	100%	70.150.000	31.652.000	45,12%	100%
30	Pemeliharaan K3	-	-	-	-	1.000.000.000	998.499.350	94,38%	100%	642.285.000	642.285.000	100,00%	100%
31	Pengembangan/Peningkatan K3	-	-	-	-	2.062.500.000	1.966.031.520	95,27%	100%	691.550.000	671.901.460	97,16%	100%
32	Penataan TPA	-	-	-	-	200.000.000	198.500.000	99,25%	100%	200.000.000	187.305.000	93,65%	100%
33	BOP Kebersihan	-	-	-	-	150.000.000	145.201.440	96,80%	100%	114.000.000	103.265.590	90,58%	100%
34	Oprasional UPTD pengelolaan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	375.622.000	343.287.000	91,39%	100%
35	Pengadaan alat berat TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274.660.058	1.274.660.058	100,00%	100%
36	Pengadaan tanah TPA Landoh	-	-	-	-	-	-	-	-	3.201.338.000	3.189.965.110	99,64%	100%
37	Pembangunan Gedung Bank Sampah Induk	-	-	-	-	-	-	-	-	167.000.000	161.202.000	96,53%	100%
06	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>770.900.000</b>	<b>740.075.000</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000</b>	<b>381.157.000</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>	<b>1.195.400.242</b>	<b>896.038.160</b>	74,96%	100%
38	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	55.000.000	54.200.000	98,55	100%	100.000.000	94.375.000	94,38%	100%	75.000.000	50.436.000	67,25%	100%
39	Pemantauan kualitas Lingkungan	-	-	-	-	100.000.000	86.050.000	86,05%	100%	49.000.000	47.745.000	97,44%	100%
40	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	61.900.000	58.456.000	94,44	100%	66.000.000	49.900.000	75,65%	100%	52.085.242	48.961.000	94,00%	100%
41	Pengelola B3 dan Limbah B3	-	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	61.163.160	91,29%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	20.000.000	19.050.000	95,25	100%	30.000.000	29.000.000	96,67%	100%	22.000.000	20.500.000	93,18%	100%
43	Pemeliharaan dan Oprasional Laboratorium lingkungan hidup	140.000.000	124.619.000	89,01	100%	-	-	-	-	105.300.000	89.000.000	84,52%	100%
44	Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL	25.000.000	24.600.000	98,40	100%	74.000.000	64.457.000	87,10%	100%	67.000.000	66.885.000	99,78%	100%
45	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	100	100%	20.000.000	19.350.000	96,75%	100%	27.000.000	26.950.000	99,81%	100%
46	Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	200.000.000	197.000.000	98,70	100%	-	-	-	-	500.000.000	261.575.000	52,32%	100%
47	Koordinasi ADIWiyata	229.000.000	222.155.000	97,01	100%	15.000.000	13.025.000	86,83%	100%	35.000.000	26.923.000	99,95%	100%
48	Event Peringatan hari Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	196.015.000	195.923.000	99,95%	100%
49	Sosialisasi mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan penambangan	25.000.000	25.000.000	100	100%	25.000.000	25.000.000	100%	100%	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>380.000.000</b>	<b>367.500.000</b>	<b>97</b>	<b>100%</b>	<b>570.000.000</b>	<b>555.620.000</b>			<b>258.349.000</b>	<b>255.411.500</b>	<b>98,86%</b>	<b>100%</b>
49	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan					-	-	-	-	129.249.000	129.249.000	100,00%	100%
50	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber air	250.000.000	237.500.000	95	100%	230.000.000	224.050.000	97,41%	100%	-	-	-	-
51	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber daya Alam	20.000.000	20.000.000	100	100%	25.000.000	24.000.000	96,00%	100%	34.100.000	32.950.000	96,63%	100%
52	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	35.000.000	35.000.000	100	100%	50.000.000	49.630.000	99,26%	100%	60.000.000	59.107.500	96,63%	100%
53	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	20.000.000	20.000.000	100	100%	240.000.000	233.310.000	97,21%	100%	-	-	-	-
54	Koordinasi Kalpataru	35.000.000	35.000.000	100	100%	25.000.000	24.630.000	98,52%	100%	-	-	-	-
55	Koordinasi Indonesia Hijau	20.000.000	20.000.000	100	100%	-	-	-	-	35.000.000	34.105.000	98,51%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	100	100%	56.000.000	36.410.000	60,82%	100%	48.000.000	35.045.000	73,01%	100%
56	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	25.000.000	25.000.000	100	100%	50.000.000	30.140.000	60,82%	100%	48.000.000	35.045.000	73,01%	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	4.199.999	83,99	100%	6.000.000	6.000.000	100%	100%	-	-	-	-
09	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	20.000.000	15.490.000	77,45	100%	40.000.000	39.500.000			45.000.000	41.745.000	92,77%	100%
57	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	20.000.000	15.490.000	77,45	100%	40.000.000	39.500.000	98,75%	100%	45.000.000	41.745.000	92,77%	100%
10	Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	150.000.000	146.838.000	97,89	100%	90.000.000	81.330.000		100%	87.660.000	86.760.000	98,97%	100%
58	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	-	-	-	-	40.000.000	39.500.000	98,75%	100%	87.660.000	86.760.000	98,97%	100%
59	Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi	150.000.000	146.838.000	97,89	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut	-	-	-	-	50.000.000	41.830.000	83,66%	100%	-	-	-	-
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	342.700.000	336.834.800	98,29	100%	855.000.000	844.233.000			525.905.000	513.660.000	97,67%	100%
61	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	302.700.000	297.184.800	98,18	100%	560.000.000	553.133.000	98,77%	100%	375.175.000	368.029.000	98,10%	100%
62	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40.000.000	39.650.000	99,13	100%	295.000.000	291.100.000	98,68%	100%	150.730.000	145.631.000	96,62%	100%
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.508.810.000</b>	<b>3.382.053.749</b>	<b>96,38%</b>	<b>100%</b>	<b>6.302.200.000</b>	<b>6.071.182.964</b>	<b>96,33%</b>	<b>100%</b>	<b>12.341.252.000</b>	<b>11.954.577.650</b>	<b>96,87%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2. 12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2019**

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian
			Keuangan	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.525.790.000</b>	<b>1.459.333.632</b>	<b>95,64%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	69.628.116	69,63%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	223.950.000	220.574.250	98,49%	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71.000.000	70.999.050	100,00%	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.000.000	4.424.000	88,48%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.893.500	98,23%	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	17.711.000	93,22%	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	6.000.000	5.979.450	99,66%	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.920.000	98,40%	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	27.000.000	26.989.000	99,96%	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	130.000.000	114.766.796	88,28%	100 %
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	889.440.000	888.439.070	99,89%	100%

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian
			Keuangan	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	43.400.000	29.009.400	66,84%	100%
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>126.000.000</b>	<b>123.117.989</b>	<b>97,71%</b>	<b>100%</b>
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.024.950	96,10%	100%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000	64.472.239	99,19%	100%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.959.000	99,49%	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air	8.000.000	7.862.000	98,28%	100%
17	Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas	20.000.000	18.799.800	94,00%	100%
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.696.800</b>	<b>77,05%</b>	<b>100%</b>
18	Fasilitasi Jasa Olahraga	3.500.000	2.696.800	77,05%	100%
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>213.734.000</b>	<b>206.667.550</b>	<b>96,69%</b>	<b>100%</b>
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	15.000.000	14.943.100	99,62%	%
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	14.899.350	74,50%	100%
21	Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah	16.460.000	16.460.000	100,00%	100%
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	54.774.000	54.773.100	100,00%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian
			Keuangan	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
23	Penyusunan Renstra, Renja	50.000.000	48.294.500	96,59%	100%
24	Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran	15.000.000	14.999.200	99,99%	100%
25	Penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD	32.000.000	31.991.400	99,97%	100%
26	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Anggaran	10.500.000	10.306.900	98,16%	100%
<b>05</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>4.307.796.000</b>	<b>4.184.842.282</b>	<b>97,15%</b>	<b>100%</b>
27	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	2.786.676.000	2.747.321.400	98,59%	100%
28	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	32.543.000	31.814.100	97,76%	100%
29	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	198.927.000	124.928.000	62,80%	100%
30	Pemeliharaan K3 (Pengelolaan dan Penanganan Persampahan)	611.704.000	611.686.850	100,00%	100%
31	Pengembangan/Peningkatan K3 (Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan)	197.650.000	192.482.100	97,39%	100%
32	Penataan TPA	100.000.000	98.425.000	98,43%	100%
33	Biaya Operasional Kebersihan	123.296.000	123.294.275	100,00%	100%
34	Operasional UPTD Pengelolaan Sampah	257.000.000	254.890.557	99,18%	100%
<b>06</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>587.730.000</b>	<b>541.989.625</b>	<b>92,22%</b>	<b>93,18%</b>
35	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	207.320.000	198.966.400	95,97%	100%

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian
			Keuangan	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
36	Pemantauan Kualitas Lingkungan	36.700.000	26.362.625	71,83%	100%
37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	20.000.000	19.782.150	98,91%	100%
38	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	25.000.000	24.513.000	98,05%	100%
39	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	20.000.000	18.551.000	92,76%	100%
40	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	13.300.000	13.300.000	100,00%	100%
41	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	10.000.000	1.500.000	15,00%	25%
42	Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	192.000.000	184.081.700	95,88%	100%
43	Pemantauan Upaya Pemantauan Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Analisis Dampak Lingkungan	25.000.000	16.935.850	67,74%	100%
44	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	20.000.000	19.976.700	99,88%	100%
45	Koordinasi Adiwiyata	18.410.000	18.020.200	97,88%	100%
46	Event Peringatan hari Bumi	-	-	0%	0%
<b>07</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>55.000.000</b>	<b>47.598.625</b>	<b>86,54%</b>	<b>100%</b>
47	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	30.000.000	29.178.375	97,26%	100%
48	Koordinasi Kalpataru dan Saka Kalpataru	25.000.000	18.420.250	73,68%	100%
<b>08</b>	<b>Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>	<b>244.800.000</b>	<b>242.712.000</b>	<b>99,15%</b>	<b>100%</b>

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian
			Keuangan	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
49	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	244.800.000	242.712.000	99,15%	100%
<b>09</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.091.700</b>	<b>50,18%</b>	<b>50%</b>
50	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	50.000.000	25.091.700	50,18%	50%
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.472.600</b>	<b>94,95%</b>	<b>100%</b>
51	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Polusi	50.000.000	47.472.600	94,95%	100%
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di kawasan konservasi laut dan Hutan</b>	<b>145.000.000</b>	<b>142.197.450</b>	<b>98,07%</b>	<b>100%</b>
52	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Kawasan Konservasi laut dan Hutan	100.000.000	99.147.450	99,15%	100%
53	Peningkatan Sumber Daya masyarakat Pesisir	45.000.000	43.050.000	95,67%	100%
<b>12</b>	<b>Program Pengelolaan &amp; Rehabilitasi Ekosistem Pesisir &amp; Laut</b>	<b>265.000.000</b>	<b>261.290.500</b>	<b>98,60%</b>	<b>100%</b>
54	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	240.000.000	237.640.500	99,02%	100%
55	Sosialisasi Pengelolaan Pesisir dan Laut	25.000.000	23.650.000	94,60%	100%
<b>13</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>715.200.000</b>	<b>696.158.688</b>	<b>97,34%</b>	<b>100%</b>
56	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	575.000.000	556.330.846	96,75%	100%
57	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	140.200.000	139.827.842	99,73%	100%
	<b>J U M L A H</b>	<b>8.289.550.000</b>	<b>7.981.169.441</b>	<b>96%</b>	

**Tabel 2. 13 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang 2020**

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian
		Perubahan	Keuangan	Keuangan	Fisik
		(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA</b>	<b>12.955.362.531</b>	<b>12.128.001.020</b>	<b>94%</b>	
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.172.401.000</b>	<b>7.772.264.911</b>	<b>95%</b>	
	Belanja Pegawai	8.172.401.000	7.772.264.911	95%	
	- Gaji dan Tunjangan	6.383.401.000	6.250.608.803	98%	
	- TPP	1.789.000.000	1.521.656.108	85%	
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.782.961.531</b>	<b>4.355.736.109</b>	<b>91,07%</b>	<b>0,00%</b>
<b>01</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>798.084.115</b>	<b>685.770.539</b>	<b>85,93%</b>	<b>100,00%</b>
1	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	639.184.115	551.515.034	86,28%	100,00%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123.200.000	122.355.505	99,31%	100,00%
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	8.500.000	8.500.000	100,00%	100,00%
4	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	27.200.000	3.400.000	12,50%	100,00%
<b>02</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>113.762.000</b>	<b>112.341.000</b>	<b>98,75%</b>	<b>100,00%</b>
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.262.000	64.841.000	99,35%	100,00%
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.500.000	47.500.000	97,94%	100,00%
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>86,67%</b>	<b>100,00%</b>

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian
		Perubahan	Keuangan	Keuangan	Fisik
		(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
7	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	6.000.000	5.200.000	86,67%	100,00%
<b>04</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>502.005.470</b>	<b>463.719.920</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>
8	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	87.487.400	80.402.400	91,90%	100,00%
9	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	263.909.070	259.958.520	98,50%	100,00%
10	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	150.609.000	123.359.000	81,91%	100,00%
<b>05</b>	<b>Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>259.518.950</b>	<b>229.088.650</b>	<b>88,27%</b>	<b>100,00%</b>
11	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	132.822.950	117.622.950	88,56%	100,00%
12	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	53.976.300	46.246.000	85,68%	100,00%
13	Penuaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	72.719.700	65.219.700	89,69%	100,00%
<b>06</b>	<b>Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas</b>	<b>3.103.590.996</b>	<b>2.859.616.000</b>	<b>92,14%</b>	<b>100,00%</b>
14	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	42.332.000	42.332.000	100,00%	100,00%
15	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	13.000.000	12.818.000	98,60%	100,00%
16	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	126.883.000	123.608.000	97,42%	100,00%
17	Operasional Pengumpulan, Pengangkutan serta Pengelolaan Sampah di TPA	2.921.375.996	2.680.858.000	91,77%	100,00%
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.782.961.531</b>	<b>4.355.736.109</b>		

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*





**Tabel 2.14. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.397.631.000</b>	<b>9.770.377.078</b>	<b>93,97</b>	<b>94,31</b>
<b>01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>89.500.000</b>	<b>61.350.100</b>	<b>68,55</b>	<b>84,02</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	11.900.000	59,50	80,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.000.000	17.200.000	95,56	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.500.000	32.250.100	62,62	80,00
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.287.610.000</b>	<b>7.873.849.539</b>	<b>95,01</b>	<b>95,01</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.035.330.000	7.646.829.539	95,17	95,17
	- Gaji		5.937.949.700		
	- Tunjangan ASN		1.708.879.839		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.280.000	227.020.000	95,68	95,68
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	-	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendiidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi	182.000	182.000	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>226.676.804</b>	<b>168.501.111</b>	<b>74,34</b>	<b>82,31</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.420	99,98	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.425.000	101.243.643	85,49	100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.998.050	99,96	100,00
4	Penyediaan Bahan Logistis Kantor	22.000.000	17.037.000	77,44	80,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	11.516.804	8.342.998	72,44	75,00

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.225.000	22.470.000	40,69	40,69
<b>05</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.711.043.196</b>	<b>1.597.939.926</b>	<b>93,39</b>	<b>93,49</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	830.000	389.000	46,87	50,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.162.196	38.526.408	85,31	87,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.200.000	6.324.818	36,77	42,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.647.851.000	1.552.699.700	94,23	94,23
<b>06</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.619.000</b>	<b>68.554.402</b>	<b>82,98</b>	<b>85,79</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.324.000	45.912.002	81,51	83,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	7.830.100	78,30	80,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.295.000	14.812.300	90,90	99,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>125.356.700</b>	<b>109.703.000</b>	<b>87,51</b>	<b>86,05</b>
<b>01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>125.356.700</b>	<b>109.703.000</b>	<b>87,51</b>	<b>86,05</b>
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	109.556.700	99.364.000	90,70	92,00
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	15.800.000	10.339.000	65,44	67,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>328.212.800</b>	<b>316.728.860</b>	<b>96,50</b>	<b>97,89</b>
<b>01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>81.694.840</b>	<b>74.296.100</b>	<b>90,94</b>	<b>92,67</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	54.479.840	48.295.500	88,65	90,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	27.215.000	26.000.600	95,54	98,00

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
<b>02</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>246.517.960</b>	<b>242.432.760</b>	<b>98,34</b>	<b>99,62</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	46.517.960	44.766.160	96,23	98,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	200.000.000	197.666.600	98,83	100,00
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>286.787.200</b>	<b>278.021.702</b>	<b>96,94</b>	<b>98,00</b>
<b>01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>286.787.200</b>	<b>278.021.702</b>	<b>96,94</b>	<b>98,00</b>
1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	28.857.200	27.751.692	96,17	98,00
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	257.930.000	250.270.010	97,03	98,00
3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	-	-	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.177.500</b>	<b>92,71</b>	<b>95,53</b>
<b>01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.177.500</b>	<b>92,71</b>	<b>95,53</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.345.000	20.572.500	92,07	95,00
2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.655.000	2.605.000	98,12	100,00
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>59.758.300</b>	<b>26.180.000</b>	<b>43,81</b>	<b>45,00</b>
<b>01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.758.300</b>	<b>26.180.000</b>	<b>43,81</b>	<b>45,00</b>
1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.758.300	26.180.000	43,81	45,00
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>75.000.000</b>	<b>70.130.000</b>	<b>93,51</b>	<b>95,00</b>

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
<b>01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>70.130.000</b>	<b>93,51</b>	<b>95,00</b>
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	70.130.000	93,51	95,00
<b>H</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	<b>107.620.500</b>	<b>97,84</b>	<b>98,00</b>
<b>01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	<b>107.620.500</b>	<b>97,84</b>	<b>98,00</b>
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110.000.000	107.620.500	97,84	98,00
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>39.200.000</b>	<b>21.250.050</b>	<b>54,21</b>	<b>56,75</b>
<b>01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>39.200.000</b>	<b>21.250.050</b>	<b>54,21</b>	<b>56,75</b>
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4.000.000	2.320.000	58,00	60,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	35.200.000	18.930.050	53,78	55,00
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.946.318.000</b>	<b>2.804.248.044</b>	<b>95,18</b>	<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>2.946.318.000</b>	<b>2.804.248.044</b>	<b>95,18</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25.750.000	25.735.000	99,94	100,00
2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS/TPS/SPA Kabupaten/Kota	2.790.768.000	2.650.068.044	94,96	100,00
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	129.800.000	128.445.000	98,96	100,00
<b>K</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>187.000.000</b>	<b>186.234.050</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>187.000.000</b>	<b>186.234.050</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>
1	Penyediaan Sarana Persampahan	187.000.000	186.234.050	99,59	100,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>14.580.264.000</b>	<b>13.713.670.784</b>	<b>94,06</b>	

**Tabel 2. 10 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah timbulan sampah per hari (Kg)	Jumlah timbulan sampah per hari (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (m3)
			$3 = 2 \times 0,36$	$4 = 3 / 1000$	$5 = 4 \times 365$	6
	1	2	3	4	5	
1	Rembang	90,800	32,688	32.688	11,931.12	36,151.29
2	Kaliori	40,969	14,749	14.749	5,383.33	16,311.48
3	Sulang	38,958	14,025	14.025	5,119.08	15,510.82
4	Bulu	26,723	9,620	9.620	3,511.40	10,639.55
5	Sumber	35,014	12,605	12.605	4,600.84	13,940.54
6	Lasem	49,502	17,821	17.821	6,504.56	19,708.83
7	Pancur	29,240	10,526	10.526	3,842.14	11,641.67
8	Pamotan	45,908	16,527	16.527	6,032.31	18,277.90
9	Sedan	54,359	19,569	19.569	7,142.77	21,642.60
10	Sale	37,844	13,624	13.624	4,972.70	15,067.29
11	Gunem	24,041	8,655	8.655	3,158.99	9,571.73
12	Kragan	62,721	22,580	22.580	8,241.54	24,971.86
13	Sluke	28,057	10,101	10.101	3,686.69	11,170.67
14	Sarang	64,765	23,315	23.315	8,510.12	25,785.67
	<b>Jumlah</b>	<b>628,901</b>	<b>226,404</b>	<b>226.404</b>	<b>82,637.59</b>	<b>250,391.90</b>

Keterangan :

- \* Estimasi Timbulan Sampah Per Jiwa = 0,36 Kg/hari
  - \* Sumber data penduduk : Rembang Dalam Angka Tahun 2018
  - \* Konversi --> 1 m3 = 0,33 ton
  - \* Konversi --> 1 ton = 3,03 m3
- Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah ,  
Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas DLH  
Kab.Rembang

**Tabel 2. 11 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah timbulan sampah per hari (Kg)	Jumlah timbulan sampah per hari (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (m3)
			3 = 2 x 0,36	4 = 3 /1000	5 = 4 x 365	6
	1	2	3	4	5	6
1	Rembang	90,170	32,461	32.461	11,848.34	35,900.46
2	Kaliori	41,891	15,081	15.081	5,504.48	16,678.57
3	Sulang	38,720	13,939	13.939	5,087.81	15,416.06
4	Bulu	27,819	10,015	10.015	3,655.42	11,075.91
5	Sumber	36,396	13,103	13.103	4,782.43	14,490.78
6	Lasem	50,568	18,204	18.204	6,644.64	20,133.24
7	Pancur	30,609	11,019	11.019	4,022.02	12,186.73
8	Pamotan	49,097	17,675	17.675	6,451.35	19,547.58
9	Sedan	54,162	19,498	19.498	7,116.89	21,564.17
10	Sale	38,716	13,938	13.938	5,087.28	15,414.47
11	Gunem	23,933	8,616	8.616	3,144.80	9,528.73
12	Kragan	64,006	23,042	23.042	8,410.39	25,483.48
13	Sluke	29,378	10,576	10.576	3,860.27	11,696.62
14	Sarang	60,532	21,792	21.792	7,953.90	24,100.33
	Jumlah	<b>635,997</b>	<b>228,959</b>	<b>228.959</b>	<b>83,570.01</b>	<b>253,217.12</b>

**Keterangan :**

- \* Estimasi Timbulan Sampah Per Jiwa = 0,36 Kg/hari
  - \* Sumber data penduduk : DKB Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang
  - \* Konversi --> 1 m3 = 0,33 ton
  - \* Konversi --> 1 ton = 3,03 m3
- Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kab.Rembang Tahun 2018



**Tabel 2. 12 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang Tahun 2019**

.No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah timbulan sampah per hari (Kg)	Jumlah timbulan sampah per hari (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (m3)
			$3 = 2 \times 0,36$	$4 = 3 / 1000$	$5 = 4 \times 365$	6
	1	2	3	4	5	6
1	Rembang	90,963	32,747	32.747	11,952.54	36,216.19
2	Kaliori	42,032	15,132	15.132	5,523.00	16,734.70
3	Sulang	38,709	13,935	13.935	5,086.36	15,411.68
4	Bulu	27,967	10,068	10.068	3,674.86	11,134.84
5	Sumber	36,559	13,161	13.161	4,803.85	14,555.67
6	Lasem	50,872	18,314	18.314	6,684.58	20,254.28
7	Pancur	30,831	11,099	11.099	4,051.19	12,275.12
8	Pamotan	49,381	17,777	17.777	6,488.66	19,660.65
9	Sedan	54,588	19,652	19.652	7,172.86	21,733.78
10	Sale	38,589	13,892	13.892	5,070.59	15,363.90
11	Gunem	24,066	8,664	8.664	3,162.27	9,581.69
12	Kragan	64,758	23,313	23.313	8,509.20	25,782.88
13	Sluke	29,536	10,633	10.633	3,881.03	11,759.52
14	Sarang	61,113	22,001	22.001	8,030.25	24,331.65
	<b>Jumlah</b>	<b>639,964</b>	<b>230,387</b>	<b>230.387</b>	<b>84,091.27</b>	<b>254,796.55</b>

**Keterangan :**

- \* Estimasi Timbulan Sampah Per Jiwa = 0,36 Kg/hari
  - \* Sumber data penduduk : DKB Semester II Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang
  - \* Konversi --> 1 m3 = 0,33 ton
  - \* Konversi --> 1 ton = 3,03 m3
- Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kab.Rembang Tahun 2019

**Tabel 2. 13 Jumlah Timbulan Sampah Sampah Per Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang Tahun 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah timbulan sampah per hari (Kg)	Jumlah timbulan sampah per hari (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (ton)	Jumlah timbulan sampah per tahun (m3)
			3 = 2 x 0,37	4 = 3 / 1000	5 = 4 x 365	6
	1	2	3	4	5	6
1	Rembang	91,390	33,814	33.814	12,342.22	37,396.93
2	Kaliori	42,590	15,758	15.758	5,751.78	17,427.89
3	Sulang	39,069	14,456	14.456	5,276.27	15,987.09
4	Bulu	28,052	10,379	10.379	3,788.42	11,478.92
5	Sumber	36,854	13,636	13.636	4,977.13	15,080.71
6	Lasem	50,719	18,766	18.766	6,849.60	20,754.29
7	Pancur	30,924	11,442	11.442	4,176.29	12,654.15
8	Pamotan	49,960	18,485	18.485	6,747.10	20,443.71
9	Sedan	55,070	20,376	20.376	7,437.20	22,534.73
10	Sale	38,669	14,308	14.308	5,222.25	15,823.41
11	Gunem	24,302	8,992	8.992	3,281.99	9,944.41
12	Kragan	65,155	24,107	24.107	8,799.18	26,661.52
13	Sluke	29,606	10,954	10.954	3,998.29	12,114.82
14	Sarang	61,147	22,624	22.624	8,257.90	25,021.44
	Jumlah	<b>643,507</b>	<b>238,098</b>	<b>238.098</b>	<b>86,905.62</b>	<b>263,324.03</b>

**Keterangan :**

- \* Estimasi Timbulan Sampah Per Jiwa = 0,37 Kg/hari
  - \* Sumber data penduduk : DKB Semester II Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang
  - \* Konversi --> 1 m3 = 0,33 ton
  - \* Konversi --> 1 ton = 3,03 m3
- Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas. DLH Kab. Rembang Tahun 2020.

**Tabel 2. 14 Jumlah Sampah Terangkut Ke TPA Per Kecamatan Tahun 2017-2020**

No	Kecamatan	Sampah Terangkut ke TPA			
		2017	2018	2019	2020
1	Sumber	0	0-	-	22.5
2	Bulu	0	0	1.125	-
3	Gunem	0	0	25.875	49.5
4	Sale	0	26.071,4	24.76	22.5
5	Sarang	16.940	286.785,7	209.285	230.625
6	Sedan	15.150	156.428,6	112.515	192.375
7	Pamotan	13.108	312,857.1	338.685	319.5
8	Sulang	10.792	156.428,6	179.99	168.75
9	Kaliori	0	39.107,1	46.145	104.625
10	Rembang	14.174	7.695.267,8	8,276.375	8,478
11	Pancur	0	13.035,7	9.015	11.25
12	Kragan	17.834	521.426,6	442.05	435.375
13	Sluke	6.159	26.071,4	7.89	3.375
14	Lasem	8.981	2.607.142,9	2,499.915	2,353.5
	<b>TOTAL</b>	<b>103.138</b>	<b>11.840.624,9</b>	<b>12,173.63</b>	<b>12,391.88</b>

**Sumber Data : UPTD Pengelolaan Persampahan Dinas LH Th 2017-2020**

**Tabel 2. 15 Jumlah Perkembangan Bank Sampah Aktif Tahun 2017-2020**

No	DINAS	JUMLAH BANK SAMPAH AKTIF			
		2017	2018	2019	2020
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	3	77	93

**Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rembang.**

**Tabel 2. 16 Perusahaan Yang Memiliki Ijin Penyimpanan Limbah B3 Di Kabupaten Rembang**

TAHUN	JML IJIN PENYIMPANAN LIMBAH B3
2016	2
2017	-
2018	11
2019	13
2020	18

Sumber Data : Seksi Limbah B.3 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B.3 dan Peningkatan Kapasitas.

**Tabel 2. 17 Rekomendasi Ijin Dan SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

TAHUN	JML IJIN DAN SPPL YANG DIKELUARKAN
2016	-
2017	-
2018	-
2019	584
2020	123

Sumber Data : Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan.

Tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Dengan berkembangnya industri akan mempengaruhi peningkatan terjadinya konflik sosial yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup.
2. Pemenuhan hak masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat.

3. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
4. Melestarikan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan .

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Tingginya peran serta pelaku usaha sektor industri dalam mewujudkan kondisi kualitas lingkungan yang lebih baik.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah.
4. Meningkatkan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2016-2021, namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2021-2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan pencemaran air, udara, tanah, permasalahan sampah, limbah industri dan batik, serta permasalahan kerusakan lingkungan juga terjadi dikarenakan kerusakan lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperlukan sebagai pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat
  - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
  - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
  - Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - Belum meratanya RTH di semua kecamatan
  - Belum optimalnya pengelolaan KEHATI
  - Belum optimalnya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
3. Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan
  - Kurangnya sarana prasarana persampahan dan sumber daya manusia
4. Bidang Perencanaan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan
  - Kajian lingkungan belum dilaksanakan
5. UPT Pengelolaan Sampah



- Kurangnya tenaga/petugas kebersihan di lapangan
- Kurangnya kebutuhan prasarana dan sarana pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah,

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan, meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan, kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar; adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri khususnya pencemaran air
- Belum optimalnya tutupan hutan
- Masih rendahnya penanganan pengelolaan sampah

**Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri khususnya pencemaran air	- Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup yang belum optimal	Lemahnya koordinasi dan belum terintegrasinya perijinan, pengawasan, dan pemantauan (belum adanya pemantauan online)
		- Kewajiban pembuatan laporan semesteran, uji kebisingan dan debu, uji kualitas air, dll yang belum dilaksanakan	Kurangnya kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan dokumen UKL-UPL dan SPPL
2	Masih rendahnya penanganan pengelolaan sampah	Kurangnya sarana prasarana persampahan dan Sumber Daya Manusia	- Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai
3	Belum optimalnya tutupan hutan	- Belum optimalnya pengelolaan KEHATI	- Belum ada dokumen RIP (Rencana Induk Pengelolaan) KEHATI
		- Ketersediaan lahan dan dana/anggaran	- Minimnya alokasi lahan di semua Kecamatan untuk penyediaan RTH publik

## **B. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan Kabupaten Rembang dalam Ranwal RPJMD 2021- 2026 adalah **‘REMBANG GEMILANG 2026’** yang bermakna Gemati, Gampil, Gamblang.

*Gemati* adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya. Memastikan pemerintah hadir dalam masalah-masalah publik yang dihadapi warga untuk menciptakan kondisi Rembang Gemilang.

*Gampil* adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses oleh masyarakat, sebagai pilar untuk membangun soliditas birokrasi dan masyarakat.

*Gamblang* adalah terwujudnya regulasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial ekonomi yang didasari atas prinsip yang gamblang, cetho, transparan, terukur dan akuntable sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Sedangkan misi Untuk mewujudkan visi tersebut ada 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Misi I : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane);
2. Misi II : Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial (Mumpuni, Sehat jasmani dan rohani Wargane);
3. Misi III : Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Tuwuh Ekonomine);
4. Misi IV : Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal (Makmur Wargane) Misi ini dimaksudkan untuk menjadi arahan seluruh desa di Kabupaten Rembang agar dapat mengembangkan potensi desanya sehingga memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Dari 4 (empat) rumusan misi tersebut yang terkait atau sejalan yang perlu diaktualisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, yaitu :

Misi 1 : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi ;

Misi 3 yaitu Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

Berdasarkan hasil telaahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, ditetapkan tujuan Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sedangkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian, target kinerja, ketepatan pelaporan, pelaksanaan program dan kegiatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya nilai indeks kualitas air (IKA) dan meningkatnya indeks kualitas udara (IKU);
4. Meningkatnya luas tutupan lahan
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah

**Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi :</p> <p>1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja Birokrasi</p> <p>2. Membangun Insfrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan SDM yang terampil Dinas Lingkungan Hidup masih kurang</li> <li>• Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal (dengan akar masalah masih terjadinya pencemaran air dan udara, penanganan hutan dan lahan kritis yang belum optimal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya Anggaran yang tersedia</li> <li>• Ketersediaan SDM tenaga teknis laborat Lingkungan yang terbatas</li> <li>• Kurangnya personil tenaga kebersihan</li> <li>• Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah</li> <li>• Makin bertambahnya aktivitas industri/usaha</li> </ul>	<p>1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Permen LH tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Tujuan: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik  2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah			
3	Sasaran : 1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			

### C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: **“Terwujudnya**

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sedangkan rumusan misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 juga memuat indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;



- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing,

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pada prinsipnya sebagian besar sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penanganannya	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;	Terbatasnya anggaran yang tersedia	Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas	Keinginan masyarakat atas terpenuhinya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Terbatasnya anggaran yang tersedia		Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan sumber daya alam
4	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> <li>• Terbantur regulasi tentang pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan hutan</li> </ul>		
5	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing,	Maih minimnya SDM yang menangani bidang Lingkungan Hidup		



**b. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terletak pada misi ke-7 yaitu : Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk mendukung visi dan misi Gubernur terpilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan hukum bidang lingkungan.
- 2) Melaksanakan program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- 3) Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan
- 4) Penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman penghijauan
- 5) Meningkatkan capaian lahan kritis yang di rehabilitasi
- 6) Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dan sumber daya hutan
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu meningkatkan kelestarian lingkungan, hal tersebut yang menjadi faktor pendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam mempertimbangkan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang di dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

**Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan sasaran Renstra Kementrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan	Minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tentang informasi pengendalian pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman pelaku usaha tentang informasi status mutu air masih kurang</li> <li>• Masih banyaknya</li> </ul>	Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas;

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	hukum bidang lingkungan		usaha/kegiatan UMKM, industri menengah dan besar yang belum melaksanakan pengolahan limbah	

## D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### a. Telaahan RTRW

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Didalamnya menyebutkan bahwa tujuan dari penataan Ruang Nasional antara lain :

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan pada tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah yang antara lain memiliki tujuan antara lain untuk mewujudkan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Di dalam Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 pada Bab II Pasal 4 bahwa

tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Di dalam telaahan rencana tata ruang wilayah tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan, hal tersebut dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam rencana tata ruang wilayah, maka OPD dapat menyusun rancangan program beserta target yang sesuai dengan RTRW tersebut.

**Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

**Keberhasilan Penanganannya**

**KABUPATEN REMBANG**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perlindungan dan Konservasi SDA	Kurangnya koordinasi antar lintas sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya kegiatan Reklamasi kawasan pertambangan</li> <li>Rusaknya pesisir pantai akibat abrasi</li> </ul>	Adanya upaya dari propinsi untuk penanggulangan abrasi dengan pembangunan sabuk pantai
2	Keanekaragaman hayati dan ekosistem (KEHATI)	Masih terjadinya kerusakan mangrove	Ketidakpedulian masyarakat terhadap kelangsungan manfaat mangrove	Peran serta masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati

**b. Telaahaan KLHS**

Sesuai UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Persyaratan dalam UU 32 Tahun 2009 dalam kajian KLHS adalah :

- 1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Kinerja pelayanan ekosistem;

- 3) Fungsi penyedia, regulator, budaya dan kontrol
- 4) Efisiensi dalam penggunaan SDA;
- 5) Keanekaragaman dan ketahanan hayati;
- 6) Dampak dan resiko lingkungan;
- 7) Kerentanan dan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian maka perangkat daerah pengampu program-program diharapkan melakukan tindakan-tindakan mitigasi dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat implementasi program-program dari perangkat daerah tersebut.

#### **E. Penentuan Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah :

1. Masih terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air maupun udara
2. Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
3. Belum adanya dokumen RIP (Rencana Induk Pengelolaan) KEHATI

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki satu visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tujuh misi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki tugas untuk mewujudkan misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang juga mewujudkan misi kedua yaitu membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Tujuan yang harus dicapai oleh OPD yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan.

Sedangkan sasaran OPD untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya nilai indeks kualitas air (IKA) dan meningkatnya indeks kualitas udara (IKU);
2. Meningkatnya luas tutupan lahan
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah

Dengan indikator sasaran :

1. Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Prosentase peningkatan Indeks kualitas Udara (IKU)
2. Prosentase kenaikan tutupan lahan
3. Indeks pengelolaan sampah

**Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Program Jangka Menengah  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61-88,30	76,61-88,30	76,61-88,30	76,61-88,30	76,61-88,30
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks kualitas air, b. Indeks kualitas udara c. Indeks kualitas tutupan lahan	a. 52 b. 90 c. 59,64	a. 53 b. 90 c. 59,82	a. 54 b. 90 c. 60	a.55 b. 90 c.60,18	a.56 b. 90 c. 60,35
Sasaran	Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian, target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi capaian dalam penilaian SAKIP OPD (LKJiP) PD	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
	1. Meningkatnya nilai indeks kualitas air dan Udara (IKA dan IKU)	a. Prosentase peningkatan IKA b. Prosentase peningkatan IKU	a. - 13,21 b. 0,05	a. 1,92 b. 0	a. 1,88. b. 0	a.1,85 b. 0	a. 1,81 b. 0
	2. Meningkatnya luas tutupan lahan	Prosentase kenaikan tutupan lahan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks pengelolaan sampah (IPS)	44,8	45	45,2	46	46
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan pelayanan keuangan	90	90	90	90	90
		Prosentase ketercapaian pelayanan kepegawaian	90	90	90	90	90
		Porsentase pelayanan umum	90	90	90	90	90
		Prosentase ketercukupan jasa penunjang dan sarana prasarana aparatur	80	80	80	80	80
Kegiatan	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	8	10	10	10	10
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	90	90	90	90	90
	Administrasi Kepegawaian	Prosentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	90	90	90	90	90

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Perangkat Daerah						
	Administrasi umum perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum	90	90	90	90	90
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Prosentase jasa penunjang yang terlaksana	80	80	80	80	80
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	80	80	80	80	80
Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	3	3	3	3	3
	Koordinasi dan penyusunan RKA-DPA SKPD	Jumlah dokumen anggaran OPD	2	2	2	2	2
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD	10	10	10	10	10
	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian yang terpenuhi	1	1	1	1	1
	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelayanan umum yang terlaksana	8	8	8	8	8
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang terlaksana	4	4	4	4	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD yang dilaksanakan	3	3	3	3	3
Program	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan lingkungan tidak melebihi cemar ringan	60	60	60	60	60
Kegiatan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3	3	3	3	3

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Lingkungan Hidup Kab/Kota						
Sub Kegiatan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah laporan IKA dan IKU	1	1	1	1	1
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah laporan inventarisasi IGRK	1	1	1	1	1
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah laporan tahunan pengelolaan laboratorium	1	1	1	1	1
Kegiatan	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi kerusakan Lingkungan yang tertangani	4	4	4	4	4
Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah sungai yang dibersihkan	2	2	2	2	2
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi lahan	2	2	2	2	2
Program	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Prosentase perusahaan yang memiliki TPS limbah B3	26	28	30	32	34
Kegiatan	Penyimpanan	Jumlah perusahaan yang	5	5	5	5	5

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	sementara limbah B3	memiliki penyimpanan sementara limbah B3					
Sub Kegiatan	Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah TPS limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	5	5	5	5
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah frekuensi verifikasi lapangan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 (kali)	5	5	5	5	5
Program	Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketercapaian target IKLH	100	100	100	100	100
Kegiatan	Rencana PERlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab/Kota	Prosentase dokumen perencanaan LH Kab yang tersusun	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan	Penyusunan dan penetapan RPPLH kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan LH yang tersusun	3	2	2	2	2
	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang telah sesuai dengan dokumen RPPLH Kab	5	5	5	5	5
Program	Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	80	85	90	95	100
Kegiatan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan pengelolaan LH (PPLH) kab/Kota	Prosentase aduan yang tertangani	100	100	100	100	100

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah aduan yang tertangani	6	6	6	6	6
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah penerapan sanksi administrasi atas sengketa LH	6	6	6	6	6
Program	Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)	Prosentase ijin lingkungan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100
Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLHnya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemkab	30	30	30	30	30
Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemkab/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap pemegang ijin lingkungan (kali)	50	50	50	50	50
Program	Penghargaan LH untuk masyarakat	Prosentase penghargaan LH untuk sekolah	2,87	3,25	3,63	4,02	4,4
		Prosentase penghargaan LH untuk kelurahan	43	57	71	86	100
Kegiatan	Pemberian	Jumlah penghargaan	15	17	19	21	23

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Penghargaan LH tingkat Kabupaten/Kota	sekolah adiwiyata tingkat kabupaten					
		Jumlah Kelurahan yang menerima penghargaan kelurahan bersih dan sehat	3	4	5	6	7
Sub Kegiatan	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya LH di sekolah (GPBLHS)	2	2	2	2	2
		Peningkatan jumlah kelurahan yang bersih dan sehat	1	1	1	1	1
Program	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	60	70	80	90	100
Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (orang)	530	640	750	860	970
Sub Kegiatan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang berkompeten dalam bidang LH (orang)	150	170	190	210	230
	Pendampingan gerakan peduli LH	Jumlah masyarakat yang aktif dalam gerakan LH di Kab Rembang (orang)	380	470	560	650	740

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye LH	Prosentase lokasi titik pantau ADIPURA yang mempunyai kriteria penilaian adipura	19,05	38,10	57,14	76,19	100
Program	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas RTH baru/terfasilitasi	1	1	1	1	1
Kegiatan	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota	Jumlah lokasi RTH baru/terfasilitasi	4	4	4	4	4
Sub Kegiatan	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Jumlah hutan kota terfasilitasi	1	1	1	1	1
	Pengelolaan RTH	Jumlah RTH terfasilitasi	2	2	2	2	2
	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah desa Proklamasi yang terbentuk	1	1	1	1	1
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarpras KEHATI yang dikelola					
Program	Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan sampah	32	38	45	51	57
Kegiatan	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola (ton/tahun)	92.025,69	92.761,9	95.901,54	100.086,33	100.887,02
Sub Kegiatan	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang berkurang (ton/tahun)	24.168,36	25.297,70	27.123,70	30.025,90	30.266,10
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA / TPST/SPA	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	67.857,33	67.463,20	68.777,87	70.060,43	70.620,92

\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Uraian		Indikator	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	kab/Kota						
	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Perda tentang pengelolaan TPST RDF	1	0	0	0	0
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarpras pengelolaan sampah yang tersedia (unit)	36	44	49	54	59
Kegiatan	Pengelolaan Sampah	Jumlah komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah	120	140	160	180	200
Sub Kegiatan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan persampahan (orang)	680	700	720	740	760

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi**

Untuk mencapai tujuan pada misi ke tiga (3) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Rembang yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, langkah-langkah strategi yang dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mendukung tujuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan, penataan, dan pengendalian pencemaran lingkungan guna peningkatan kualitas air dan udara melalui penyadaran perusahaan dan masyarakat;
2. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, konservasi air, dan peningkatan kualitas lahan.
3. Meningkatkan pelayanan sampah melalui pengurangan sampah dari sumbernya penambahan bank sampah hingga RT serta pengolahan akhir sampah dengan *sistem control sanitary landfill* .

#### **B. Arah Kebijakan**

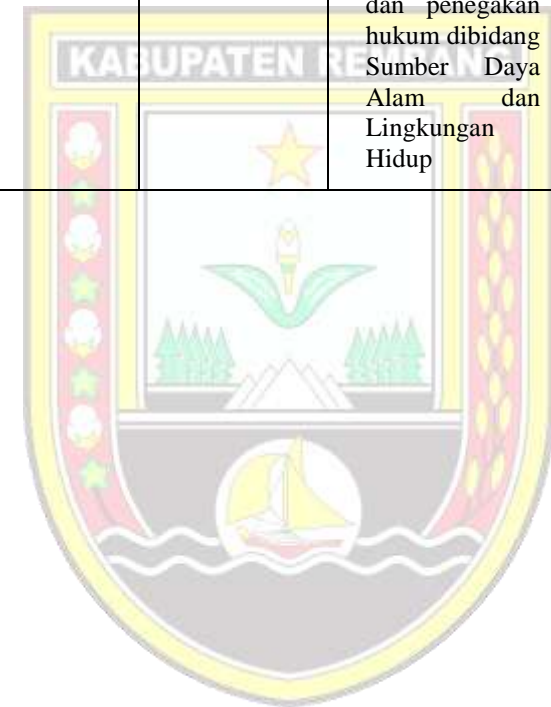
Untuk melaksanakan atau menindaklanjuti langkah-langkah strategi, maka arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi



**Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan OPD	Sasaran OPD
1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah,	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Sasaran ke 8)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Memperkuat kelembagaan dan penegakan hukum dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ol>	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya nilai indeks kualitas Air (IKA) dan Meningkatnya nilai indeks kualitas Udara (IKU)</li> <li>2. Meningkatnya luas tutupan lahan</li> <li>3. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah</li> </ol>



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### A. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menetapkan program, kegiatan sub kegiatan jangka menengah sebagai berikut :

**Tabel 6. 1 Rencana Program Kegiatan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah 2. Koordinasi dan penyusunan RKA-DPA 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah
		5. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
		6. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan LH Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		2. Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar. 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya 4. Pengelolaan sarana dan prasarana KEHATI
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab/Kota	1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota 2. Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota
5	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota	1. Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan Lingkungan Hidup di Luar pengadilan atau melalui pengadilan
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
7	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1. Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat daerah Kab/Kota	1. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan LH
8	Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	1. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH untuk kemasyarakatan 2. Pendampingan gerakan peduli LH 3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH
9	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	1. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali 2. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA 3. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA 5. Peningkatan peran serta dalam pengelolaan persampahan

**Tabel 6. 2 Pendanaan Indikatif Tahun 2022 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang**

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
					23,581,531,000	20.987.691.000	20.987.691.000	20.987.691.000	20.987.691.000	
			<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>11,140,210,000</b>	<b>10.867.691,000</b>	<b>10.867.691,000</b>	<b>10.867.691,000</b>	<b>10.867.691,000</b>	
			201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131,550,000	142,500.000	142,500.000	142,500.000	142,500.000	
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,000,000	15,000,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
			1	Penyusunan Renstra/Renja OPD	15,000,000	15,000,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU
			04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-DPA SKPD	51,050,000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	
			1	Penyusunan Dokumen-dokumen Anggaran	12,250,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU
			2	Honorarium admin e-Planning, e bugdeting, SIRUP/RUP, e -MONEV, SAKIP,operator SIMDA	13,800,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU
			3	Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah	25,000,000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	65,500,000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	
				1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan pengendalian kegiatan dan Evaluasi Renja Semesteran	30,000,000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DAU
				2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15,000,000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DAU
				3	Survei Kepuasan Masyarakat	6,000,000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	DAU
				4	Jasa Publikasi / Iklan	3,000,000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DAU
				5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,500,000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	DAU
				202	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,414,019,000	8.455.000.000	8.455.000.000	8.455.000.000	8.455.000.000	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,139,019,000	8.140.000.000	8.140.000.000	8.140.000.000	8.140.000.000	DAU
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	265,000,000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	DAU
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10,000,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
			205	Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374,000,000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3,000,000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
			10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	371,000,000	0	0	0	0	
			206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183,950,000	189.500.000	189.500.000	189.500.000	189.500.000	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,950,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DAU
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAU
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan-minum)	20,000,000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan	4,000,000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	DAU
			07	Penyediaan Bahan Material (ATK)	10,000,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
				09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar)	90,000,000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	DAU
			<b>208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,926,691,000</b>	<b>1.936.691.000</b>	<b>1.936.691.000</b>	<b>1.936.691.000</b>	<b>1.936.691.000</b>	
				01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	DAU
				02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	120,000,000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	DAU
				03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU
				04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Kontrak & THL)	1,795,691,000	1.795.691.000	1.795.691.000	1.798.691.000	1.795.961.000	DAU
			<b>209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110,000,000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	
				01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,000,000	80.000.000	80.000.0000	80.000.000	80.000.000	DAU
				06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Service AC)	10,000,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU
				09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
II				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1,020,000,000</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>	
			201	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	500,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
			01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	250,000,000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	DAU
			02	Oprasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	50,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
			03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DAU
			203	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<b>520,000,000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	120,000,000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DAU
				Pengembangan Kegiatan Prokasih Bersama Masyarakat	120,000,000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	400,000,000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	DAU
						300,000,000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Usulan OPD
					Penanaman pohon sepanjang pantai dasun kec.Lasem	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
					Penanaman turus jalan Sulang-Sumber 4,5 km	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
			<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>1,600,000,000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	
				201	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,600,000,000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	
				02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				3	Pemeliharaan Hutan Kota						
				04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<b>1,300,000,000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
				Pemangkasan pohon sepanjang jalur hijau di wilayah kota rembang	200,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	K1
				Penyiraman RTH Perkotaan	100,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	K1
					200,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Usulan OPD
				Pemeliharaan Taman	200,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				Pengadaan Pot dan Tanaman Hias	200,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				Penataan Tanaman Kota	200,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				Penataan RTH	200,000,000	0	0	0	0	POKIR DEWAN
			05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Usulan OPD
			07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Usulan OPD
			<b>IV</b>	<b>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>9,016,321,000</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	11	11	2.0	Pengelolaan Sampah	9,016,321,000	7.100.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	
			1							
			02	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	1,000,000,000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
				1 Peningkatan pengurangan sampah melalui pendampingan Bank Sampah	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD
				2 Pelatihan dan Pembinaan Bank Sampah Ds Turusgede	200,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
				3 Pembangunan Bank Sampah Desa Turusgede	200,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
				4 Pembangunan Bank Sampah Desa Lambangan Wetan	200,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
				5 Pembangunan Gedung Bak Sampah Desa Sumbergirang Lasem	200,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				6 Pengadaan sarana prasarana Bank Sampah Ds SumberGirang Lasem	200,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2,019,321,000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				1	Pendampingan Retribusi dan Pengadaan Tempat sampah bagi pelanggan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Usulan OPD
				1	Operasional UPTD Pengelolaan Sampah	1,944,321,000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	APBD
11	11	2.01	04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	500,000,000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
				1	Pembinaan Kader Lingkungan	100,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
				2	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	50,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
				3	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	50,000,000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD
				4	Peringatan World Cleanup Day / Hari Pungut Sampah Sedunia (WCD)	50,000,000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD
				5	Pelatihan Bank Sampah Desa Dasun Kec.Lasem	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG
				6	Pelatihan Bank Sampah desa Sidorejo Pamotan	25,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				7	Pelatihan Masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Ds Gedangan Rembang	25,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG
				8	Pelatihan Pengurangan dan Daur Ulang sampah kel Tanjungsari RT.04/01	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG
				9	Pembangunan Bank sampah Kel Tanjungsari Rembang	75,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG
				10	Pembinaan Pelatihan masyarakat dalam pengelolaan sampah Ds Sulang Kec.Sulang	25,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANG
11	11	2.01	06		Penyusunan Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Persampahan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
				1	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan RDF	200,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
11	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,297,000,000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	
				1	Pengadaan Dump Truck	900,000,000	900.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	APBD
				2	Pengadaan Arm Roll	1,600,000,000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				3	Pengadaan Kontainer Sampah	547,000,000	600.000.000	600.000.000.	600.000.000	600.000.000	APBD
				4	Pengadaan alat berat (Buldozer)		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD
				5	Pengadaan Amroll	900,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				6	Pengadaan Dump Truck	450,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				7	Pengadaan Kontainer sampah Kec.Sarang	144,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				8	Landasan Kontainer sampah Kec.Sarang	56,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				9	Pengadaan Kontainer Sampah Kec.Kragan	144,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				10	Landasan Kontainer sampah Kec. Kragan	56,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				11	Pengadaan Kontainer Sampah Kec.Rembang	144,000,000	0	0	0	0	POKIR K1
				12	Landasan Kontainer kec.Rembang	56,000,000	0	0	0	0	POKIR K1

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*



KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				13	Pengadaan Kontainer Sampah Perum Sumbermukti	-	0	0	0	0	POKIR K2
				14	Landasan Kontainer Perum Sumbermukti	-	0	0	0	0	POKIR K2
				15	Pengadaan Kontainer sampah Ds.Sidowayah	-	0	0	0	0	POKIR K2
				16	Landasan Kontainer Sampah Ds Sidowayah	-	0	0	0	0	POKIR K2
				17	Pengadaan Kontainer sampah Ds.Selopuro Kec.Lasem	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
				18	Pengadaan Kontainer sampah Ds Ringin Pamotan	50,000,000	0	0	0	0	MUSRENBANGCAM
				19	Pengadaan Kontainer Sampah Kab.Rembang	144,000,000	0	0	0	0	POKIR DEWAN
				20	Landasan Kontainer sampah Kab.Rembang	56,000,000	0	0	0	0	POKIR DEWAN
<b>11</b>	<b>08</b>		<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>300,000,000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
11	08	2.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
11	08	2.	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
				1 Pemberdayaan Pengurus Bank Sampah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	APBD
11	08	2.	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				1 Gerakan Jumat Bersih dan Minggu Bersih	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	APBD
				2 Pembinaan Kalpataru	25,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD
				3 Pembinaan Saka Kalpataru	25,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD
11	08	2.	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye LH	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
				1 Koordinasi Pencapaian Kota Sehat Adipura	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	APBD

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
11	09		VI	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>150,000,000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	
11	09	2. 01	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	
11	09	2. 01		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150,000,000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	
		2		Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau Tingkat Kabupaten	75,000,000	90.000.00	90.000.000	90.000.000	90.000.000	APBD
		3		Penilaian dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata	75,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
11	05		VII	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>80,000,000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
11	05	2. 01	01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	80,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
11	05	2. 01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA	
					2022	2023	2024	2025	2026		
				1	Pelayanan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
				2	Pembinaan dan Pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	0	0	0	0	0	APBD
11'	05	2. 01	02		<b>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	20,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				1	Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	20,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD
			<b>VIII</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>150,000,000</b>	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	
			A		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	150,000,000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	
				1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	100,000,000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	50,000,000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
			<b>IX</b>		<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN</b>	<b>60,000,000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

KODE				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif					SUMBER DANA
					2022	2023	2024	2025	2026	
				<b>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						
			<b>A</b>	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	DAU
			<b>X</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>65,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	65,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	DAU
			<b>A</b>	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
			<b>B</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	40,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	

\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

Kelompok sasaran meliputi :

- 1) UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan obyek domestik
- 2) Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah
- 3) Hutan dan lahan perdesaan serta areal ekosistem di Kabupaten Rembang
- 4) Daerah rawan bencana
- 5) Daerah tangkapan sumber mata air di perdesaan, jenis tanaman langka dan ruang terbuka hijau
- 6) Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup

• **Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun kedepan.

**Tabel 6. 3 Visi Misi Tujuan, Indikator Tujuan Daerah, Sasaran dan Indikator sasaran**

<b>Daerah</b>					
<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan Daerah</b>	<b>Indikator Tujuan Daerah</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>REMBANG GEMILANG 2026</b>	Misi ke 1. Mengembangkan Profesionalisme, Modernisasi, Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	Tujuan ke 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indikator sasaran 1 : Nilai SAKIP  Indeks Kepuasan Masyarakat Form = Jumlah nilai rata-rata (NRR) tertimbang x 25
	Misi ke 3 : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Tujuan 3 : meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif berbasis sumber daya lokal	Indikator tujuan 3 : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)= (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKL)	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indikator sasaran 18 : Indek Kualitas Air dan Udara, dan Tutupan Lahan (IKA,IKU) IKL = 100- ((84,3-(THX100))x50 /54,3)

**Tabel 6. 4 Tujuan, Indikator Tujuan OPD, Sasaran, Indikator Sasaran OPD  
2022 – 2026**

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian, target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi capaian dalam penilaian SAKIP OPD (LKJiP) PD
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks kualitas air, b. Indeks kualitas udara c. Indeks kualitas tutupan lahan = $100 - ((84,3 - (THX100)) \times 50 / 54,3)$	Meningkatnya nilai indeks kualitas air (IKA) dan meningkatnya nilai indeks kualitas udara (IKU)	a. Prosentase peningkatan IKA (nilai IKA tahun berjalan – nilai IKA tahun sebelumnya / nilai IKA tahun sebelumnya) x 100% b. Prosentase peningkatan IKU (nilai IKU tahun berjalan - nilai IKU tahun sebelumnya / nilai IKU tahun sebelumnya) x 100%
			Meningkatnya luas tutupan lahan	Prosentase kenaikan tutupan lahan (( luas tutupan lahan tahun berjalan - luas tutupan lahan tahun sebelumnya) / luas



No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
				tutupan lahan tahun sebelumnya)) x100%
			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks pengelolaan sampah (IPS) = 2. Pengurangan sampah = 60 x jumlah capaian pengurangan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah (ton) 3. Penanganan sampah = 40 x jml capaian penanganan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah

**Tabel 6. 5 Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab Rembang Tahun 2022 - 2026**

Uraian	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan pelayanan keuangan
		Prosentase ketercapaian pelayanan kepegawaian
		Porsentase pelayanan umum
		Prosentase ketercukupan jasa penunjang dan sarana prasarana aparatur
Kegiatan	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan kepegawaian
	Administrasi umum perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Prosentase jasa penunjang yang terlaksana

Uraian	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara
Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD
	Koordinasi dan penyusunan RKA-DPA SKPD	Jumlah dokumen anggaran OPD
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD
	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian yang terpenuhi
	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelayanan umum yang terlaksana
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang terlaksana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD yang dilaksanakan
Program	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan lingkungan tidak melebihi cemar ringan
Kegiatan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan
Sub Kegiatan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah laporan IKA dan IKU
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah laporan inventarisasi IGRK
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah laporan tahunan pengelolaan laboratorium
Kegiatan	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi kerusakan LInggungan yang tertangani
Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah sungai yang dibersihkan
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi lahan
Program	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Prosentase perusahaan yang memiliki TPS limbah B3
Kegiatan	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah perusahaan yang memiliki penyimpanan sementara limbah B3
Sub Kegiatan	Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah TPS limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Uraian	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah frekuensi verifikasi lapangan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 (kali)
Program	Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketercapaian target IKLH
Kegiatan	Rencana PERlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab/Kota	Prosentase dokumen perencanaan LH Kab yang tersusun
Sub Kegiatan	Penyusunan dan penetapan RPPLH kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan LH yang tersusun
	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang telah sesuai dengan dokumen RPPLH Kab
Program	Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan
Kegiatan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan pengelolaan LH (PPLH) kab/Kota	Prosentase aduan yang tertangani
Sub Kegiatan	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah aduan yang tertangani
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah penerapan sanksi administrasi atas sengketa LH
Program	Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)	Prosentase ijin lingkungan yang terfasilitasi
Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLHnya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemkab
Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemkab/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap pemegang ijin lingkungan (kali)
Program	Penghargaan LH untuk masyarakat	Prosentase penghargaan LH untuk sekolah Prosentase penghargaan LH untuk kelurahan
Kegiatan	Pemberian Penghargaan LH tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten
		Jumlah Kelurahan yang menerima penghargaan kelurahan bersih dan sehat
Sub Kegiatan	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya LH di sekolah (GPBLHS)

Uraian	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
		Peningkatan jumlah kelurahan yang bersih dan sehat
Program	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH
Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (orang)
Sub Kegiatan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang berkompeten dalam bidang LH (orang)
	Pendampingan gerakan peduli LH	Jumlah masyarakat yang aktif dalam gerakan LH di Kab Rembang (orang)
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye LH	Prosentase lokasi titik pantau ADIPURA yang mempunyai kriteria penilaian adipura
Program	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas RTH baru/terfasilitasi
Kegiatan	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota	Jumlah lokasi RTH baru/terfasilitasi
Sub Kegiatan	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Jumlah hutan kota terfasilitasi
	Pengelolaan RTH	Jumlah RTH terfasilitasi
	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah desa Proklim yang terbentuk
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarpras KEHATI yang dikelola
Program	Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan sampah
Kegiatan	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola (ton/tahun)
Sub Kegiatan	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang berkurang (ton/tahun)
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA / TPST/SPA kab/Kota	Jumlah sampah yang tertangani (ton)
	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Perda tentang pengelolaan TPST RDF
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarpras pengelolaan sampah yang tersedia (unit)
Kegiatan	Pengelolaan Sampah	Jumlah komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah

Uraian	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
Sub Kegiatan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan persampahan (orang)



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut



**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Sat	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	16,85	Na	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
2	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	25,5	Na	0	0	0	0	0
3	Prosentase Kenaikan tutupan lahan	%	4,2	Na	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Indeks Pengelolaan Sampah	Indeks	43	Na	44,8	45	45,2	46	46

NB : penetapan Indikator Kinerja Utama diambil dari Indikator sasaran OPD



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan rangkaian program kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima tahun periode 2021-2026. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan acuan dan pedoman yang dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dapat terwujud antara lain :

1. Pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholder secara bersama-sama dapat meningkatkan bidang pembangunan.
2. Pencapaian tingkat kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan hidup.
4. Pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang khususnya di bidang lingkungan hidup.



Rembang, Juli 2022

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rembang**



**Ir. DWI PURWANTO,MM**

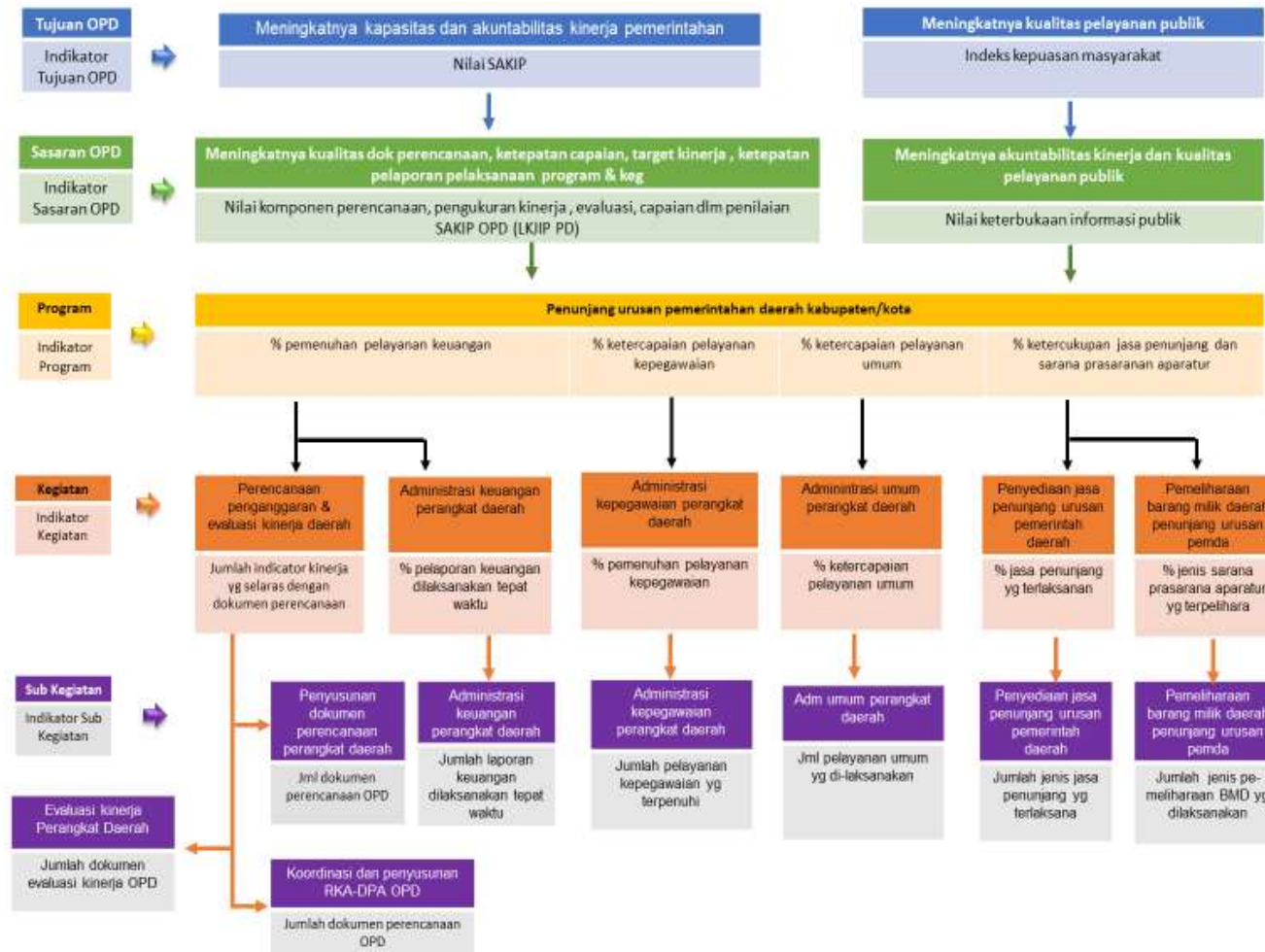
Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009

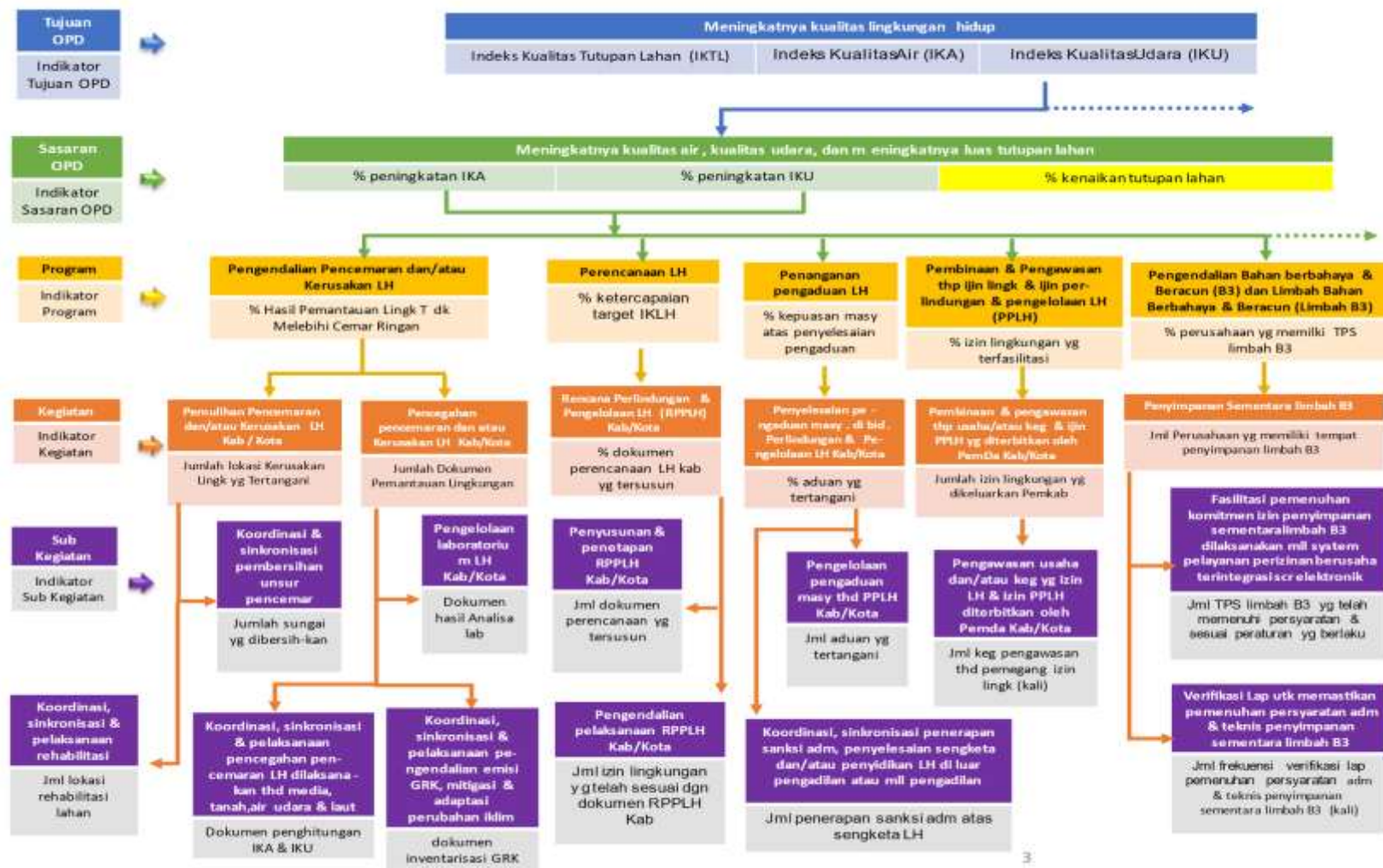
## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

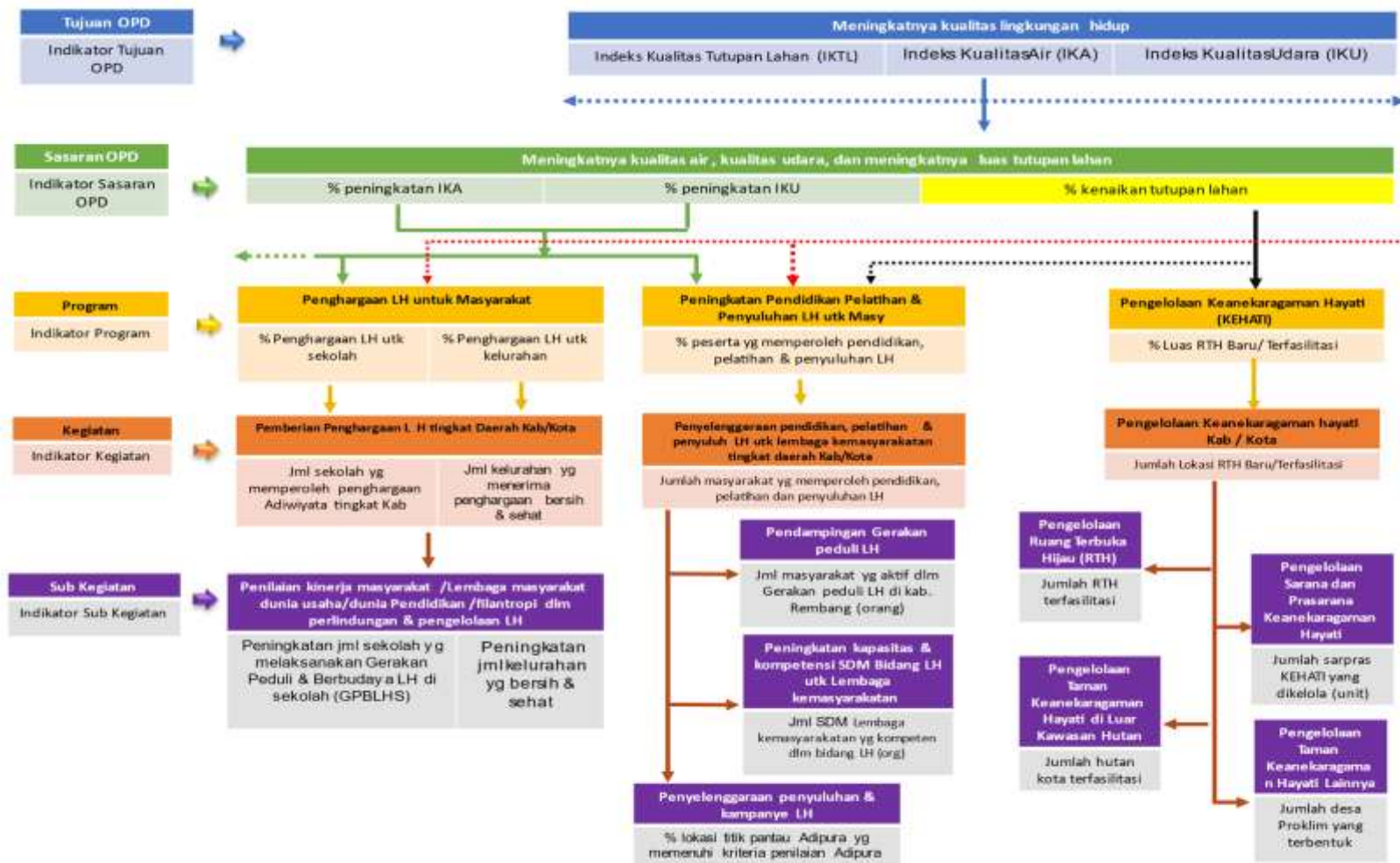


2



\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*





\*\* RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup \*

